

PENGARUH ZONASI TERHADAP ARUS MASUK PESERTA DIDIK BARU DI SMP MUHAMMADIYAH KOTA SURAKARTA

Rizky Hanifah dan Mohamad Ali
Program Studi Pendidikan Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Email: rizkyhanif975@gmail.com dan ma122@ums.ac.id

ABSTRACT

The zoning policy is an activity in the Acceptance of New Students which makes the area a benchmark for acceptance of prospective new students in state schools. This policy is reaping the pros and cons of the people. This study aims to (1) describe the effect of zoning policies on the inflow of new students in Muhammadiyah Middle School Surakarta City; (2) Analyzing the responses of the managers and organizers of Muhammadiyah Middle School in Surakarta to the zoning policy.

This research is field research using a mixed-method and phenomenological approach. Retrieval of data, researchers used interviews, documentation and observation methods.

The results showed that the effect of zoning on the inflow of new learners in the Muhammadiyah Middle School in Surakarta City varied. Muhammadiyah PK SMP and Muhammadiyah 1 SMP SMP did not have much influence on the influx of new learners. However, at Muhammadiyah 4 and SMP 5 Muhammadiyah 5 harmed the inflow of new students. School managers also gave mixed responses in dealing with zoning policies. As a school organizer, the Surakarta City PDM Basic Education Board considers that the zoning policy is considered unfair and does not have a specific strategy in dealin

Keywords: *Zoning, PPDB, Muhammadiyah Surakarta Middle School*

التجريد. سياسة تقسيم المناطق هي أحد الأنشطة في قبول الطلاب الجدد مما يجعل المنطقة معياراً لقبول مرشح الطلاب الجدد في المدرسة الحكومية. هذه السياسة تجني الإيجابيات والسلبيات بين الناس. يهدف هذا البحث لـ (1) وصف تأثير سياسات تقسيم المناطق على تدفقات دخول الطلاب الجدد في المدرسة الثانوية المحمدية بمدينة سوراكرتا؛ (2) تحليل ردود مدير ومنظم المدرسة الثانوية المحمدية بمدينة سوراكرتا نحو سياسة تقسيم المناطق. هذا البحث هو بحث ميداني باستخدام طريقة المزج ونهج الظواهر. جمع البيانات، استخدم الباحث أساليب المقابلة والتوثيق والملاحظة. أوضحت النتائج أن تأثير تقسيم المناطق على تدفق دخول الطلاب الجدد في المدرسة الثانوية

المحمدية بمدينة سواركتا متنوعة. المدرسة الثانوية المحمدية للبرنامج الخاص والمدرسة الثانوية المحمدية 1 سواركتا لا تتأثر كثيرا نحو تدفق دخول الطلاب الجدد ولكن، في المدرسة الثانوية المحمدية 4 والمدرسة الثانوية المحمدية 5 تتأثر أثرا سلبيا على تدفقات دخول الطلاب الجدد. يقدم مدير المدرسة أيضا استجابات متنوعة في التعامل مع سياسات تقسيم المناطق. كمنظم المدرسة، يعتبر مجلس التعليم الإبتدائي والثانوي لرئاسة المحمدية البلدية بمدينة سواركتا أن سياسات تقسيم المناطق تعتبر غير عادلة وليس لديها استراتيجية خاصة في التعامل مع تقسيم المناطق

الكلمات الرئيسية: تقسيم المناطق، قبول الطلاب الجدد، المدرسة الثانوية المحمدية بسواركتا

PENDAHULUAN

Kebijakan pendidikan di Indonesia mengalami dinamika setiap masanya untuk mewujudkan kualitas pendidikan yang lebih baik. Salah satu kebijakan pendidikan yang saat ini menjadi perbincangan di kalangan masyarakat adalah kebijakan zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Kebijakan zonasi yang menjadikan kedekatan jarak rumah peserta didik dari sekolah sebagai acuan diterima atau tidaknya di suatu sekolah menuai pro dan kontra. Mereka yang pro terhadap kebijakan zonasi berasumsi bahwa kebijakan ini menghapus label sekolah favorit serta dapat memberikan kesempatan anak miskin diterima oleh sekolah negeri yang bagus. Bagi mereka yang kontra, kebijakan zonasi ini

dianggap membatasi peserta didik cerdas yang tempat tinggalnya jauh dari sekolah serta menguntungkan peserta didik biasa yang nilainya lebih rendah namun berdomisili lebih dekat dari sekolah.¹

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2019 melalui tiga jalur, (1) Jalur zonasi dengan kuota paling sedikit 90%; (2) Jalur prestasi dengan kuota paling banyak 5%; (3) Jalur Perpindahan tugas orang tua/wali dengan kuota paling banyak 5%.² Akan tetapi, ketentuan zonasi ini dikecualikan untuk sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat, atau biasa kita sebut sebagai sekolah swasta.³

Muhammadiyah merupakan gerakan Islam yang juga mendirikan sekolah swasta berciri khusus agama (Islam), sehingga sekolah-sekolah

¹<https://www.beritasatu.com/megapolitan/560106/ppdb-jalur-zonasi-tuai-pro-dan-kontra/> diakses pada 4 Desember 2019 pukul 21.30 WIB

²Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (PERMENDIKBUD) Republik Indonesia No. 51 Tahun 2018 pasal 16 ayat (1) - (4) tentang Penerimaan Peserta Didik Baru, 11.

³Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (PERMENDIKBUD) Republik Indonesia No. 14 Tahun 2018 pasal 29 ayat (3) tentang Penerimaan Peserta Didik Baru, 17.

Muhammadiyah dikecualikan dari kebijakan zonasi. Di Surakarta, Muhammadiyah mendirikan 9 Sekolah Menengah Pertama (SMP), yaitu SMP Muhammadiyah Program Khusus Kottabarat Surakarta (SMP Muh PK), SMP Muhammadiyah 1 Surakarta, SMP Muhammadiyah 2 Surakarta, SMP Muhammadiyah 4 Surakarta, SMP Muhammadiyah 5 Surakarta, SMP Muhammadiyah 6 Surakarta, SMP Muhammadiyah 7 Surakarta, SMP Muhammadiyah 8 Surakarta dan SMP Muhammadiyah 10 Surakarta.

Muhammadiyah juga membentuk Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah untuk melaksanakan tugas pengawasan dan pembinaan sekolah. Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Muhammadiyah merupakan salah satu majelis yang berada di dalam Persyarikatan Muhammadiyah yang memiliki tugas pokok menyelenggarakan amal usaha serta tugas pekerjaan dalam bidang pendidikan dasar dan menengah.⁴

Dari sembilan SMP Muhammadiyah Surakarta, terdapat 4 SMP yang diselenggarakan Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah (Majelis Dikdasmen)

Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kota Surakarta, yaitu SMP Muhammadiyah Program Khusus Kottabarat Surakarta, SMP Muhammadiyah 1 Surakarta, SMP Muhammadiyah 4 Surakarta dan SMP Muhammadiyah 5 Surakarta. Lima SMP Muhammadiyah yang lain tidak diselenggarakan oleh Majelis Dikdasmen, tetapi diselenggarakan ranting atau cabang.⁵

Adanya kebijakan zonasi ini dapat memberikan pengaruh terhadap arus masuk peserta didik baru di setiap Sekolah Menengah Pertama Muhammadiyah Surakarta. Sebagai contoh, SMP Muhammadiyah Program Khusus Kota Barat Surakarta selalu mengalami peningkatan jumlah peserta didik setiap tahunnya. Penerimaan peserta didik baru 2019 ini menyediakan kuota sejumlah 90 siswa, sementara pendaftarnya mencapai ratusan.⁶ Pemerintah Kota Surakarta memberlakukan ketentuan, bahwa calon peserta didik baru tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Surakarta harus memilih empat SMP Negeri, sehingga banyak siswa yang masuk ke sekolah negeri. Sekolah Menengah Pertama (SMP) negeri juga terus menambah

⁴Faizal, *Upaya Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) Daerah Kota Medan dalam Meningkatkan Kualitas Sekolah Dasar dan Menengah Muhammadiyah*, Jurnal EduTech Vol. 3 No.2, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, September 2017, 32.

⁵Hasil wawancara dengan Bapak Ir. H. Tridjono di Kantor Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Surakarta pada Selasa, 15 Oktober 2019.

⁶<https://solo.tribunnews.com/2019/0611/pendaftar-membludak-seleksi-siswa-baru-smp-muhammadiyah-program-khusus-pk-kota-barat-solo-ketat/> diakses pada 20 September 2019 pukul 07:27 wib

jumlah rombongan belajar sehingga arus masuk peserta didik baru ke SMP swasta semakin menurun. Di sisi lain, dalam satu dekade terakhir terdengar SMP swasta yang mati karena ketiadaan siswa.⁷ Sistem PPDB 2019 juga merugikan sekolah swasta karena adanya kebijakan calon peserta didik baru harus memilih empat SMP Negeri mengakibatkan pemerataannya kurang seimbang bagi sekolah swasta.⁸

Penelitian ini bertujuan (1) untuk mendeskripsikan pengaruh kebijakan zonasi terhadap arus penerimaan peserta didik baru di SMP Muhammadiyah yang diselenggarakan Majelis Dikdasmen PDM Kota Surakarta' (2) untuk menjelaskan tanggapan pengelola dan penyelenggara sekolah Muhammadiyah di Surakarta terhadap kebijakan zonasi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis *field research* atau penelitian lapangan, yang mendeskripsikan

gejala pendidikan Islam yang telah ada di lapangan. Pendekatan *mix methods* digunakan untuk pemerolehan informasi numerik maupun informasi maupun teks sehingga database akhir merepresentasikan baik informasi kuantitatif maupun kualitatif

Subjek utama dalam penelitian ini adalah pengelola dan penyelenggara SMP Muhammadiyah di Surakarta. Pengelola yang dimaksud ialah kepala SMP Muhammadiyah Program Khusus Kottabarat Surakarta, kepala SMP Muhammadiyah 1 Surakarta, kepala SMP Muhammadiyah 4 Surakarta dan kepala SMP Muhammadiyah 5 Surakarta. Penyelenggara yang dimaksud ialah Majelis Dikdasmen PDM Kota Surakarta. Metode Pengumpulan Data

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pengaruh Zonasi terhadap Arus PPDB
 - a. SMP Muhammadiyah Program Khusus Kottabarat Surakarta

No.	Tahun Pelajaran	Pendaftar	Siswa Diterima
1.	2014/2015	130	60
2.	2015/2016	127	60
3.	2016/2017	130	60
4.	2017/2018	125	90
5.	2018/2019	143	87
6.	2019/2020	143	91

Sumber : Dokumentasi Sekretaris PPDB SMP Muhammadiyah Program Khusus Kottabarat Surakarta dan Tanfidz Rapat Kerja Pimpinan Daerah 1 Muhammadiyah Kota Surakarta.

⁷<https://m.solopos.com/tantangan-serius-bagi-sekolah-swasta-992334/amp/> diakses pada 20 September 2019 pukul 08.12 WIB.

⁸https://m.rri.co.id/surakarta/post/berita/678750/pendidikan/ppdb_20192020_

Panitia PPDB SMP Muhammadiyah Program Khusus Kottabarat Surakarta hanya memiliki data arus masuk peserta didik baru selama tiga tahun terakhir, yaitu PPDB tahun pelajaran 2019/2020, 2018/2019 dan 2017/2018. Sekretaris PPDB mengalami kesulitan dalam mencari data yang lebih lama. Peneliti memperoleh data PPDB yang lebih lama dari Tanfidz Rapat Kerja Pimpinan Daerah 1 Muhammadiyah Kota Surakarta.

Dari tabel di atas jumlah pendaftar di SMP Muhammadiyah Program Khusus Kottabarat Surakarta sangat tinggi dibandingkan dengan jumlah siswa yang diterima. Pada tahun pelajaran 2014/2015 – 2016/2017, kuota yang diterima sebanyak 60 siswa. Pada tahun pelajaran 2017/2019-2019-2020, kuota ditambah sehingga yang diterima menjadi sebanyak 90 siswa.

b. SMP Muhammadiyah 1 Surakarta

No.	Tahun Pelajaran	Pendaftar	Siswa Diterima
1.	2014/2015	280	145
2.	2015/2016	310	229
3.	2016/2017	300	268
4.	2017/2018	159	159
5.	2018/2019	150	150
6.	2019/2020	200	200

Sumber : Dokumentasi Bidang Kesiswaan SMP Muhammadiyah 1 Surakarta dan Tanfidz Rapat Kerja Pimpinan Daerah I Muhammadiyah Kota Surakarta Tahun 2017

Bidang kesiswaan SMP Muhammadiyah 1 Surakarta tidak melakukan dokumentasi terhadap jumlah pendaftar, sehingga peneliti hanya memperoleh data siswa yang diterima oleh sekolah tersebut. Selanjutnya peneliti melengkapi data dari Tanfidz Rapat Kerja

Pimpinan Daerah 1 Muhammadiyah Kota Surakarta. Dalam proses penerimaan peserta didik baru, sekolah tidak melakukan seleksi yang begitu ketat sehingga peneliti berasumsi bahwa jumlah pendaftar sama dengan jumlah siswa yang diterima.

c. SMP Muhammadiyah 4 Surakarta

No.	Tahun Pelajaran	Pendaftar	Siswa Diterima
1.	2014/2015	-	-

No.	Tahun Pelajaran	Pendaftar	Siswa Diterima
-----	-----------------	-----------	----------------

No.	Tahun Pelajaran	Pendaftar	Siswa Diterima
3.	2016/2017	129	129
4.	2017/2018	106	106
5.	2018/2019	80	80
6.	2019/2020	57	57

Sumber : Dokumentasi Bidang Kesiswaan SMP Muhammadiyah 4 Surakarta dan Tanfidz Rapat Kerja Pimpinan Daerah I Muhammadiyah Kota Surakarta Tahun 2017

Bidang kesiswaan SMP Muhammadiyah 4 Surakarta tidak melakukan dokumentasi terhadap jumlah pendaftar, sehingga peneliti hanya memperoleh data siswa yang diterima selama lima tahun terakhir. Peneliti mendapat sumber data pelengkap lain dari Tanfidz Rapat Kerja Pimpinan Daerah I Muhammadiyah Kota Surakarta Tahun 2017. Dalam proses penerimaan peserta didik baru, SMP Muhammadiyah 4 Surakarta tidak melakukan seleksi yang begitu ketat sehingga peneliti membuat asumsi bahwa jumlah pendaftar sama dengan jumlah siswa yang diterima.

d. SMP Muhammadiyah 5 Surakarta

No.	Tahun Pelajaran	Pendaftar	Siswa Diterima
1.	2014/2015	179	160
2.	2015/2016	162	162
3.	2016/2017	224	207
4.	2017/2018	126	126
5.	2018/2019	148	148
6.	2019/2020	133	109

Sumber : Dokumentasi Bidang Kesiswaan SMP Muhammadiyah 5 Surakarta dan Tanfidz Rapat Kerja Pimpinan Daerah I Muhammadiyah Kota Surakarta Tahun 2017

Peneliti memperoleh data arus masuk peserta didik SMP Muhammadiyah 5 Surakarta selama tiga tahun terakhir. Hal ini disebabkan komputer sekolah diinstal ulang sehingga data yang lebih lama hilang. Data PPDB yang lebih lama peneliti peroleh dari Tanfidz Rapat Kerja Pimpinan Daerah I Muhammadiyah Kota Surakarta Tahun 2017.

2. Tanggapan Pengelola SMP Muhammadiyah Surakarta

SMP Muhammadiyah Program Khusus Kottabarat Surakarta biasa dikenal dengan sebutan SMP Muh PK. Pada Senin, 11 November 2019

peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Muhdiyatomoko, M. Pd. selaku Kepala SMP Muhammadiyah Program Khusus Kottabarat Surakarta. Beliau menjabat sebagai kepala sekolah sejak 1 Juli 2013 hingga sekarang.⁹

Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru di SMP Muhammadiyah Program Khusus dilakukan secara online dan offline. Seleksi calon peserta didik baru dilakukan melalui tes tertulis. Beberapa tes yang dilaksanakan yaitu:

- a) Tes empat mata pelajaran (Matematika, Bahasa Indonesia, IPA dan Bahasa Inggris)
- b) Tes Membaca Al-Qur'an dan hafalan Al-Qur'an (tahfidz)
- c) Tes Potensi Akademik (TPA)
- d) Wawancara dengan calon peserta didik dan orang tua/wali murid

Menurut Bapak Muhdiyatomoko, penerimaan peserta didik baru di SMP Muhammadiyah Program Khusus bersifat stabil. Stabil artinya kebijakan zonasi tidak begitu memberikan pengaruh terhadap arus masuk peserta didik baru bagi SMP Muhammadiyah Program Khusus. Bahkan, banyak calon peserta didik baru yang mendaftarkan diri berasal dari luar daerah. Jumlah pendaftar per November 2019 sudah 138 calon

peserta didik. Padahal pendaftaran peserta didik baru di sekolah belum dibuka. Pendaftar SMP Muhammadiyah Program Khusus banyak dari luar daerah sehingga adanya zonasi tidak memberikan pengaruh bagi sekolah.¹⁰

Bagi Bapak Muhdiyatomoko, adanya kebijakan zonasi itu tergantung pada masing-masing sekolah dalam menyikapinya. Misalnya, ada atau tidaknya zonasi sekolah harus berpikir bagaimana masyarakat tetap tertarik untuk mendaftarkan diri ke SMP Muhammadiyah Program Khusus. Maka pengelola sekolah melakukan penguatan internal di SMP Muhammadiyah Program Khusus. Penguatan tersebut bisa dalam hal prestasi akademik, pelayanannya, serta sumber daya manusia di dalamnya. Selama sekolah memiliki daya tarik, maka masyarakat akan tetap mendaftarkan diri ke sekolah.¹¹

Secara teknis, Majelis Dikdasmen PDM Kota Surakarta belum pernah mengadakan koordinasi khusus untuk membahas strategi menghadapi kebijakan zonasi. Pihak Majelis Dikdasmen hanya memberikan informasi secara umum dan melakukan supervisi secara rutin. Akan tetapi, dalam menghadapi kebijakan zonasi ini Majelis Dikdasmen PDM Kota

[merugikan_sekolah_swasta.html/](#) diakses pada 21 September 2019 pukul 06.33 WIB.

⁹Hasil wawancara dengan Bapak Muhdiyatomoko, M. Pd. di SMP Muhammadiyah Program Khusus Kottabarat Surakarta pada Selasa, 11 November 2019.

¹⁰Ibid.

¹¹Ibid.

Surakarta belum memberikan solusi secara nyata terhadap SMP Muhammadiyah Program Khusus.¹²

Strategi yang dilakukan SMP Muhammadiyah Program Khusus dalam meningkatkan kualitas sekolah antara lain:

- a) Memberikan pelayanan secara prima terhadap *customer* (orang tua, siswa dan masyarakat)
- b) Menjaga kualitas prestasi akademik dan non-akademik dengan menerapkan sistem *multiple intelligent*. Sehingga sekolah mencoba mengembangkan semua potensi yang dimiliki oleh peserta didik
- c) Tetap mem-branding pendidikan karakter dengan menanamkan nilai nasionalis, religius, gotong royong, serta integritas
- d) Menjaga nilai literasi agar dapat mencetak generasi yang handal dalam dunia literasi. Hal ini dapat dibuktikan dengan perpustakaan SMP Muhammadiyah Program Khusus memperoleh Juara 3 tingkat kota sebagai perpustakaan terbaik.
- e) Melakukan pembenahan secara internal
- f) Pemanfaatan media sosial sebagai sarana sosialisasi dan promosi sekolah.¹³

Dari strategi-strategi yang telah dilakukan, minat masyarakat terhadap SMP Muhammadiyah Program Khusus terus meningkat. Sekolah mendapatkan citra yang baik di kalangan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari jumlah pendaftar setiap tahun terus meningkat.¹⁴

SMP Muhammadiyah Program Khusus atau biasa disebut sebagai SMP Muh PK memiliki keunggulan sebagai sekolah berbasis ciri khusus Al-Islam dan Kemuhammadiyah, sekolah bersistem *fullday school*, kurikulum dinamis (*syari'ah*), serta memiliki program unggul yang jarang dimiliki sekolah lain, yaitu *home stay* dan *edu-trip*. *Home stay* merupakan program pengabdian masyarakat di desa terpencil yang dilakukan peserta didik kelas VII selama 3 hari 2 malam. Peserta didik dititipkan ke rumah warga untuk mengikuti kegiatan di desa. Sedangkan *edu-trip* adalah kunjungan ke sekolah-sekolah luar negeri dan ke wisata ke luar negeri yang dilakukan peserta didik kelas VIII selama empat hari.¹⁵

Adanya kenaikan arus masuk peserta didik baru di SMP Muh PK tidak disebabkan oleh adanya kebijakan zonasi. Artinya, zonasi tidak menjadi satu-satunya faktor yang mempengaruhi arus masuk

¹²Ibid.

¹³Ibid.

¹⁴Ibid.

¹⁵Ibid.

peserta didik baru di sekolah tersebut. Selama sekolah berusaha memberikan pelayanan yang baik dan meningkatkan kualitas, zonasi tidak begitu memberikan pengaruh terhadap sekolah, khususnya sekolah swasta.¹⁶

Sebagai pimpinan di SMP Muhammadiyah Program Khusus, Bapak Muhdiyatomoko, M. Pd. berharap agar kebijakan zonasi dapat meratakan kualitas pendidikan di Indonesia, serta diharapkan pemerintah tidak memaksa sekolah berciri khusus untuk mengikuti program zonasi.¹⁷

Peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Sukidi, S. Ag., M. Pd. pada Jum'at, 8 November 2019. Bapak Sukidi menjabat sebagai Kepala SMP Muhammadiyah 1 Surakarta. Menurut beliau, kebijakan zonasi memiliki pengaruh terhadap arus masuk peserta didik di SMP Muhammadiyah 1 Surakarta. Akan tetapi, pengaruh tersebut tidak begitu besar.¹⁸

Kebijakan zonasi memberikan keuntungan bagi SMP Muhammadiyah 1 Surakarta, karena sekolah diberi kebebasan tidak mengikuti aturan zonasi sehingga sekolah dapat menerima peserta didik dari berbagai daerah. Akan tetapi, kebijakan zonasi juga memberikan kerugian. SMP Muhammadiyah 1 Surakarta pernah

mengalami penurunan arus peserta didik baru cukup banyak, yaitu lebih dari 30 orang. Calon peserta didik baru yang telah diterima di sekolah negeri mengundurkan diri dari SMP Muhammadiyah 1 Surakarta meskipun mereka telah melunasi biaya pendaftaran. Secara umum, kebijakan ini tidak begitu memberikan pengaruh bagi sekolah dan dianggap sebagai tantangan untuk terus meningkatkan kualitas sekolah.¹⁹

Majelis Dikdasmen PDM Kota Surakarta melakukan koordinasi dengan SMP Muhammadiyah 1 Surakarta. Setiap sebulan sekali dilakukan pertemuan untuk memberikan pengarahan. Akan tetapi, Majelis Dikdasmen belum memberikan solusi secara detail dalam hal menghadapi kebijakan zonasi yang ada. Sehingga sekolah harus secara aktif menyusun strategi dalam menghadapi kebijakan zonasi. Strategi yang dilakukan oleh Kepala SMP Muhammadiyah 1 Surakarta antara lain:

- a) Memberikan semangat kepada civitas guru dan karyawan SMP Muhammadiyah 1 Surakarta. Kepala sekolah memberikan motivasi agar seluruh guru dan karyawan selalu semangat dan tidak putus asa dengan adanya kebijakan zonasi

¹⁶Ibid.

¹⁷Ibid.

¹⁸Hasil wawancara dengan Bapak Sukidi, S. Ag., M. Pd di SMP Muhammadiyah 1 Surakarta pada Jum'at, 8 November 2019.

- b) Memberikan pelatihan atau workshop kepada guru
- c) Membuat rumusan-rumusan agar SMP Muhammadiyah 1 Surakarta memiliki keunggulan. Hal ini dilakukan agar sekolah dapat dipercaya oleh masyarakat
- d) Membuat program yang diminati masyarakat, seperti program khusus dan dauroh tahfidz
- e) Membentuk tim humas yang solid serta memanfaatkan media sosial sebagai sarana promosi sekolah
- f) Menggunakan sistem PPDB online
- g) Mengundang siswa-siswa SD ke SMP Muhammadiyah 1 Surakarta dalam berbagai acara, misalnya acara seminar motivasi, belajar di Lab. Gamelan dan Lab. IPA, try out CBT tingkat SD, dan sebagainya
- h) Mengadakan lomba futsal antar Sekolah Dasar
- i) Lomba keagamaan, seperti lomba adzan, sholat, tilawah.²⁰

Usaha-usaha yang dilakukan sekolah ternyata mendapat perhatian dan minat masyarakat. Banyak orang tua/ wali murid yang menitipkan nama kepada kepala sekolah maupun guru untuk

mendaftarkan putra-putrinya di SMP Muhammadiyah 1 Surakarta.²¹

SMP Muhammadiyah 1 Surakarta memiliki ciri khas sebagai sekolah kader yang menanamkan akhlak mulia, sekolah ramah anak, serta memiliki program khusus. Program khusus yang ditawarkan yaitu penguatan Tahfidzul Qur'an minimal hafal 3-4 juz selama tiga tahun. SMP Muhammadiyah 1 Surakarta juga memberikan penguatan Bahasa Inggris dan Bahasa Arab, peningkatan prestasi akademik, serta program sholat dhuha berjamaah. Secara keseluruhan, lulusan SMP Muhammadiyah 1 Surakarta diharapkan mampu melaksanakan sholat dengan baik dan mampu membaca Al-Qur'an.²²

Arus masuk peserta didik baru di SMP Muhammadiyah 1 Surakarta tidak hanya disebabkan oleh adanya kebijakan zonasi. Bapak Sukidi berpendapat bahwa terjadi penurunan itu adalah hal yang wajar. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, seperti jumlah lulusan SD yang setiap tahun berubah, kebijakan masing-masing daerah yang berbeda, kurangnya promosi sekolah kepada masyarakat, populasi penduduk di suatu tempat, serta semangat masyarakat untuk menyekolahkan anak di sekolah berbasis agama.

¹⁹Ibid.

²⁰Ibid.

²¹Ibid.

²²Ibid.

Sehingga menurut beliau kebijakan zonasi bukan menjadi penyebab utama yang mempengaruhi arus masuk peserta didik baru di SMP Muhammadiyah 1 Surakarta.²³

Bapak Sukidi berharap agar pemerintah memberikan kepercayaan kepada sekolah swasta. Dalam sejarah, kelahiran sekolah swasta lebih dahulu daripada sekolah negeri. Misalnya, sekolah Muhammadiyah yang telah lahir jauh sebelum Indonesia merdeka. Sehingga beliau berharap agar sekolah swasta diberi hak untuk berkembang.²⁴

Senin, 11 November 2019 peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Drs. Sukendar, M. Pd. yang menjabat sebagai Kepala SMP Muhammadiyah 4 Surakarta sejak 2012 hingga sekarang. Sistem PPDB dilakukan secara online dan offline. Sistem online dilakukan atas kebijakan Diknas agar semua sistem PPDB di sekolah berbasis online, akan tetapi tidak diikuti pada sistem zonasi. Sedangkan sistem offline dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui latar belakang peserta didik, untuk mengetahui pilihan (minat) peserta didik, serta untuk penempatan kelas.²⁵

Kebijakan zonasi sangat mempengaruhi arus masuk peserta didik baru di SMP Muhammadiyah

4 Surakarta. Menurut beliau, adanya kebijakan zonasi sangat memberatkan dan membunuh sekolah swasta. Terdapat beberapa sekolah negeri yang berada di Kelurahan Sumber, seperti SMPN 12 Surakarta, SMPN 23 Surakarta, SMPN 1 Surakarta dan MTsN 1 Surakarta. Peserta didik yang mendaftarkan diri melalui zonasi, secara otomatis akan diterima pada salah satu dari beberapa sekolah tersebut. Sementara itu, sekolah swasta seperti SMP Muhammadiyah 4 Surakarta mendapatkan peserta didik non-zonasi yang tidak mendaftarkan di sekolah negeri. Masyarakat memilih mendaftarkan ke sekolah negeri dengan alasan biaya lebih terjangkau. Hanya terdapat 2% peserta didik yang melarikan diri dari zonasi.²⁶

Menurut Bapak Sukendar, kebijakan zonasi sangat merugikan SMP Muhammadiyah 4 Surakarta, karena membunuh karakter orang tua untuk mendaftarkan di sekolah swasta. Masyarakat (orang tua) beranggapan bahwa sekolah di negeri lebih terjangkau daripada sekolah swasta sehingga mereka mendaftarkan putra-putrinya ke sekolah negeri. Akan tetapi, masih banyak orang tua yang telah menyadari pentingnya nilai-nilai agama kemudian menyekolahkan

²³Ibid.

²⁴Ibid.

²⁵Hasil wawancara dengan Bapak Drs. Sukendar, M. Pd. di SMP Muhammadiyah 4 Surakarta pada Senin, 11 November 2019.

²⁶Ibid.

putra-putrinya di sekolah swasta meskipun dengan biaya yang tidak terjangkau.²⁷

Majelis Dikdasmen PDM Kota Surakarta melakukan supervisi di SMP Muhammadiyah 4 Surakarta. Sekolah hanya menerima informasi secara umum dari pihak Dikdasmen. Informasi yang diperoleh misalnya, sistem PPDB menggunakan zonasi dan sekolah swasta tidak diikutkan dalam sistem tersebut, pemerintah melarang sekolah swasta untuk menerima peserta didik baru sebelum waktu yang telah ditentukan. Majelis Dikdasmen PDM Kota Surakarta memberikan independensi pada sekolah tentang strategi yang dilakukan dalam menghadapi kebijakan zonasi.²⁸

Strategi yang dilakukan SMP Muhammadiyah 4 Surakarta dalam menghadapi kebijakan zonasi antara lain:

- a) Memperkuat keyakinan orang tua untuk tetap menerima keberadaan sekolah swasta
- b) Memberikan motivasi kepada orang tua untuk menyekolahkan putra-putrinya di swasta
- c) Mengadakan gathering dengan acara kajian khusus, parenting dan sebagainya
- d) Sosialisasi tentang kurikulum kepada orang tua, termasuk

penambahan materi tambahan seperti tahsin, tahfidz dan IT.²⁹

Strategi yang telah dilakukan oleh sekolah mulai mendapat perhatian dari masyarakat. Pada tahun kedua diberlakukannya kebijakan zonasi kesadaran masyarakat untuk menyekolahkan putra-putrinya di sekolah swasta berbasis Islam mulai tampak.³⁰

Ciri khas dari SMP Muhammadiyah 4 Surakarta adalah sekolah yang memiliki proram unggulan tahsin dan tahfidz. Sekolah memiliki target bagi lulusannya mampu hafal Al-Qur'an minimal juz 30. Sekolah memetakan dua program kelas, yaitu kelas reguler dan kelas *excellent* Tahsin dan Tahfidz. Tahun berikutnya Bapak Sukendar berencana akan membuka kelas unggulan baru, yaitu kelas *excellent* Tahfidz dan IT.³¹

Sementara ini menurut Bapak Sukendar, kebijakan zonasi menjadi satu-satunya faktor yang mempengaruhi arus masuk peserta didik baru di SMP Muhammadiyah 4 Surakarta. Cara pandang orang tua yang memilih menyekolahkan putra-putrinya di sekolah negeri hanya karena biaya yang terjangkau ini menurunkan minat orang tua untuk menyekolahkan di sekolah swasta. Akan tetapi, beliau yakin bahwa

²⁷Ibid.

²⁸Ibid.

²⁹Ibid.

³⁰Ibid.

³¹Ibid.

semakin lama sekolah swasta yang memiliki keunggulan akan diminati masyarakat meskipun kebijakan zonasi tetap diberlakukan.³²

Bapak Sukendar berharap kepada pemerintah agar sekolah swasta dilibatkan dalam penentuan jumlah peserta didik sehingga rombongan belajar di sekolah terpenuhi, jumlah peserta didik diterima sekolah negeri tidak melebihi kuota, pemerintah tegas terhadap pelanggaran-pelanggaran dalam PPDB, serta dilakukan penyeragaman jadwal pendaftaran.³³

Respons Kepala SMP Muhammadiyah 5 Surakarta diwakili oleh Bapak Parwanto, S. Pd. selaku waka kurikulum. Beliau menjabat sebagai waka kurikulum sejak 2014 hingga sekarang. Selain itu beliau juga menjadi humas dalam kepanitiaan PPDB SMP Muhammadiyah 5 Surakarta tahun pelajaran 2019/2020.³⁴

Menurut Bapak Purwanto, kebijakan zonasi sangat mempengaruhi arus masuk peserta didik baru di SMP Muhammadiyah 5 Surakarta, karena sekolah ini lebih banyak menjaring siswa dari luarkota, seperti Sukoharjo dan Karanganyar. Dengan adanya zonasi, siswa yang berasal dari luar kota tidak dapat mendaftarkan diri ke dalam kota

sehingga daya tampungnya sangat rendah. Beberapa sekolah swasta di Surakarta mengalami kekurangan murid hingga akhirnya sekolahnya tutup, seperti SMP Widiya Bhakti dan SMP Kristen.³⁵

SMP Muhammadiyah 5 Surakarta menggunakan sistem offline. Adanya sistem PPDB online dan kebijakan zonasi mengurangi jumlah pendaftar SMP Muhammadiyah 5 Surakarta. Sekolah swasta tidak mendapat buangan dari SMP Negeri karena apabila pendaftar tidak diterima dari SMP Negeri pilihannya, pendaftar SMP negeri yang tidak diterima akan didistribusikan ke sekolah negeri lain yang masih dalam jangkauan zonasi.³⁶

Apabila kebijakan zonasi diterapkan akan memberikan sisi positif dan negatif. Sekolah swasta yang memiliki kualitas baik akan tetap bertahan dan kuota peserta didiknya terpenuhi, seperti SMP Muhammadiyah Program Khusus. Tetapi bagi sekolah yang memiliki kualitas menengah ke bawah akan mengalami penurunan jumlah peserta didik baru.³⁷

SMP Muhammadiyah 5 Surakarta melakukan koordinasi dengan Majelis Dikdasmen PDM Kota Surakarta. Setiap ada

³²Ibid.

³³Ibid.

³⁴Wawancara dengan Bapak Parwanto, S. Pd. di SMP Muhammadiyah 5 Surakarta pada Selasa, 25 Oktober 2019.

³⁵Ibid.

³⁶Ibid.

³⁷Ibid.

pertemuan dengan Dikdasmen, sekolah menyampaikan kendala-kendala yang dihadapi. Pihak Dikdasmen memberikan masukan berupa strategi untuk menghadapi PPDB, melakukan mentoring, serta supervisi terhadap sekolah.³⁸

Usaha yang dilakukan SMP Muhammadiyah 5 Surakarta dalam menghadapi kebijakan zonasi adalah dengan meningkatkan promosi sekolah. Sekolah mengadakan *event*, seperti *try out* Ujian Nasional tingkat Sekolah Dasar dan lomba futsal tingkat Sekolah Dasar. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka untuk memperkenalkan brand sekolah kepada siswa SD. Di tengah kegiatan, panitia mempresentasikan tentang profil sekolah untuk menarik minat siswa Sekolah Dasar yang mengikuti kegiatan tersebut. Selain itu, SMP Muhammadiyah 5 Surakarta juga melakukan promosi melalui iklan radio maupun media sosial. Promosi melalui media sosial dilakukan agar SMP Muhammadiyah 5 Surakarta dapat dikenal lebih luas oleh masyarakat.³⁹

SMP Muhammadiyah 5 Surakarta berupaya untuk tetap *survive* di tengah kebijakan zonasi. Kepala sekolah melakukan koordinasi dengan para staf untuk meningkatkan kualitas sekolah. Sejak awal tahun, SMP Muhammadiyah 5 Surakarta telah

mempersiapkan PPDB dengan membentuk kepanitiaan agar proses PPDB lebih matang. Pendaftaran peserta didik baru dilakukan setelah memperoleh instruksi dari Pemerintah Kota Surakarta, karena tidak boleh mendahului. Sekolah hanya sekadar melakukan penjangkaran/ pendataan siswa SD yang akan mendaftar di SMP 5 Surakarta apabila belum mendapat instruksi dari pemerintah.⁴⁰

Peningkatan prestasi juga dilakukan oleh SMP Muhammadiyah 5 Surakarta dengan mengikuti perlombaan, seperti lomba Tahfidz serta perlombaan dibidang olahraga. Semakin banyak prestasi yang diperoleh maka citra sekolah di masyarakat akan semakin baik. Pihak sekolah juga selalu berorientasi pada peningkatan mutu serta peningkatan kinerja yang disiplin agar sekolah semakin maju.⁴¹

Selama ini usaha peningkatan mutu yang dilakukan oleh sekolah banyak mendapatkan respons dari masyarakat. Banyak orang tua/wali murid yang berminat untuk menyekolahkan putra-putrinya di SMP Muhammadiyah 5 Surakarta. Akan tetapi, tidak sedikit dari mereka yang keberatan karena terkendala oleh biaya. Penentu biaya SPP di SMP Muhammadiyah 5 Surakarta adalah Majelis Dikdasmen, bukan pihak sekolah. Biaya SPP setiap

³⁸Ibid.

³⁹Ibid.

⁴⁰Ibid.

⁴¹Ibid.

tahun selalu mengalami kenaikan. Pihak sekolah pun berharap agar ada evaluasi dari pihak Dikdasmen terkait penentuan biaya SPP agar tidak terlalu mahal atau setidaknya biaya sepadan dengan kualitas. Sekolah juga berusaha memberikan beasiswa kepada siswa berprestasi agar memberikan kesempatan belajar bagi yang kurang mampu.⁴²

SMP Muhammadiyah 5 Surakarta memiliki ciri khas atau karakteristik dalam hal penanaman karakter melalui pembiasaan ibadah. Peserta didik dibiasakan untuk sholat berjamaah dan membaca Al-Qur'an setiap hari. Bapak dan ibu guru berharap akhlak peserta didik menjadi lebih baik dengan dibiasakan sholat dan membaca Al-Qur'an. Jika akhlaknya baik, maka diharapkan hal-hal lainnya turut menjadi baik. Hal yang perlu diperbaiki adalah kerjasama dengan orang tua/ wali agar pembiasaan ini juga diterapkan di rumah. Selama ini sekolah sudah berusaha membiasakan peserta didik dengan sholat berjamaah dan membaca Al-Qur'an setiap hari, namun di rumah kurang mendapatkan monitoring dari orang tua/ wali murid.⁴³

Menurut Bapak Parwanto, kebijakan zonasi menjadi faktor utama dari berkurangnya arus masuk peserta didik baru di SMP Muhammadiyah 5 Surakarta. Hal ini

disebabkan karena dahulu peserta didik di sekolah berasal dari luar daerah. Dengan adanya kebijakan zonasi, calon peserta didik baru yang berasal dari luar daerah jumlahnya menjadi turun.⁴⁴

Pihak sekolah berharap kepada pemerintah agar melakukan peninjauan atau evaluasi terhadap kebijakan zonasi dengan cara membatasi jumlah peserta didik yang mendaftarkan di sekolah negeri. Selama ini, peserta didik diberikan empat pilihan untuk mendaftar di sekolah negeri. Kebijakan seperti ini sangat merugikan pihak sekolah swasta karena tidak sedikit dari sekolah swasta mengalami penurunan jumlah peserta didik bahkan ada yang sampai tutup karena kekurangan murid.⁴⁵

3. Tanggapan Penyelenggara Sekolah Muhammadiyah Surakarta

Fokus penelitian ini adalah SMP Muhammadiyah di Surakarta yang diselenggarakan Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kota Surakarta. Majelis ini dipimpin oleh Bapak Ir. H. Tridjono. Sebagai pihak penyelenggara SMP Muhammadiyah, Bapak Ir. H. Tridjono berpendapat bahwa kebijakan zonasi dirasa kurang adil bagi sekolah swasta, khususnya

⁴²Ibid.

⁴³Ibid.

⁴⁴Ibid.

⁴⁵Ibid.

sekolah Muhammadiyah. Calon peserta didik baru tingkat SMP diberi kesempatan mendaftar pada empat SMP Negeri di wilayah masing-masing. Di sisi lain, sekolah swasta di Surakarta memiliki kualitas yang bermacam-macam. Ada sekolah yang memiliki kualitas bagus, seperti SMP Muhammadiyah Program Khusus dan SMA Al Islam. Beliau mengatakan, "Sekolah swasta di Surakarta kurang lebih ada 36 sekolah, yang baik paling hanya 5, yang lainnya biasa-biasa saja." Pengaruh kebijakan zonasi di sekolah unggul mungkin tidak begitu tampak. Akan tetapi, kebijakan zonasi akan tampak pengaruhnya terhadap arus masuk peserta didik di sekolah swasta yang memiliki kualitas standar. Belum lagi calon peserta didik baru yang tinggal di daerah perbatasan, misalnya daerah Sangkrah, mereka dapat mendaftarkan diri ke luar wilayah yang di dekatnya, seperti SMP Negeri di Mojolaban. Apabila tidak diterima di sekolah negeri, mereka baru mendaftarkan diri ke SMP swasta. Hal ini tentu menjadikan SMP Muhammadiyah di Surakarta tersisihkan. Karena calon peserta didik baru banyak yang masuk ke sekolah negeri berdasarkan zonasi.⁴⁶

Pemerintah perlu memperhatikan peta usia. Jika banyak daya

tampung peserta didik daripada jumlah siswa yang akan mendaftar ke sekolah, maka akan terjadi perebutan peserta didik baru di sekolah-sekolah. Dengan adanya kebijakan zonasi, tentunya sekolah negeri memiliki kesempatan lebih banyak daripada sekolah swasta untuk menampung peserta didik baru. Seharusnya ada terobosan untuk mengatasi masalah tersebut agar sekolah negeri dan swasta memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh peserta didik.⁴⁷

Bapak Tridjono mengatakan bahwa sebenarnya banyak orang tua/ wali yang berminat untuk mendaftarkan putra-putrinya ke sekolah swasta. Akan tetapi, karena kendala biaya mereka mengurungkan niatnya untuk menyekolahkan putra-putrinya di sekolah swasta. Mengapa sekolah swasta mahal? Karena guru-guru yang mengajar dibayar dengan biaya SPP dari peserta didik. Gaji guru swasta pun tidak sebanyak gaji guru yang di sekolah negeri, tidak ada separuhnya. Uang SPP pun tidak hanya untuk gaji guru, tetapi juga untuk biaya operasional sekolah.⁴⁸

Sebagai Ketua Majelis Dikdasmen PDM Surakarta, Bapak Tridjono berharap ada perbaikan dari sistem zonasi yang diberlakukan. Calon peserta didik diberi pilihan

⁴⁶Hasil wawancara dengan Bapak Ir. H. Tridjono di Kantor Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Surakarta pada Selasa, 15 Oktober 2019.

⁴⁷Ibid.

⁴⁸Ibid.

empat sekolah negeri ini menurutnya terlalu “ugal-ugalan.” Harapannya ada pengurangan atau melibatkan sekolah swasta untuk dimasukkan dalam empat pilihan sekolah (2 sekolah negeri dan 2 sekolah swasta).⁴⁹

Secara umum arus masuk peserta didik baru di SMP Muhammadiyah menurun. Hanya sekolah dengan kualitas unggul yang tidak mengalami pengaruh dari kebijakan zonasi. Sebagai contoh, arus masuk peserta didik baru di SMP Muhammadiyah Program Khusus mengalami kenaikan dari PPDB 2018/2019 ke PPDB 2019/2020, yaitu sejumlah 4 siswa. Sayangnya SMP Muhammadiyah di Surakarta tidak semuanya baik. Sekolah yang berkualitas unggul masih sedikit. Apabila dibandingkan, jumlah SMP Muhammadiyah yang berkualitas biasa lebih banyak daripada SMP Muhammadiyah yang berkualitas unggul. Oleh karena itu, kebijakan zonasi dirasa merugikan bagi Sekolah Muhammadiyah.⁵⁰

Dalam dua tahun terakhir, terjadi kenaikan dan penurunan jumlah peserta didik baru di SMP Muhammadiyah yang diselenggarakan Majelis Dikdasmen PDM Surakarta. Arus masuk peserta didik baru SMP Muhammadiyah 1 Surakarta mengalami kenaikan dari 150 menjadi 200 siswa.

Sedangkan SMP Muhammadiyah 4 Surakarta, arus masuk peserta didik barunya mengalami penurunan dari 84 menjadi 59 siswa. SMP Muhammadiyah 5 Surakarta mengalami kenaikan jumlah peserta didik barunya, dari 105 menjadi 107 siswa. Terakhir, di SMP Muhammadiyah Program Khusus terjadi kenaikan jumlah peserta didiknya dari 87 menjadi 91 siswa. Secara umum, jumlah peserta didik baru diseluruh SMP Muhammadiyah Surakarta mengalami penurunan dari 946 menjadi 922 siswa.⁵¹

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, Bapak Tridjono tidak setuju apabila sistem zonasi diberlakukan pada SMP Muhammadiyah di Surakarta. Sebagai sekolah swasta, Bapak Tridjono lebih memilih sistem Penerimaan Peserta Didik Baru yang demokratis.⁵²

Sebagai penyelenggara SMP Muhammadiyah di Surakarta, Majelis Dikdasmen berencana untuk terus melakukan peningkatan mutu. Langkah awal yang dilakukan adalah dengan meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berada di sekolah. Setelah peningkatan Sumber Daya Manusia, Majelis Dikdasmen menginginkan agar setiap sekolah Muhammadiyah memiliki keistimewaan atau ciri khas. Selain itu bidang akademis,

⁴⁹Ibid.

⁵⁰Ibid.

⁵¹Ibid.

⁵²Ibid.

ketrampilan, maupun akhlak juga harus terus ditingkatkan. Majelis Dikdasmen berharap agar kepala sekolah SMP Muhammadiyah di Surakarta tidak menyerah dan terus berjuang meningkatkan mutu sekolah. Peningkatan mutu yang dilakukan kepala sekolah juga bisa melalui delapan Standar Nasional.

Menurut Bapak Tridjono, poin 1-3 di atas sangat penting untuk meningkatkan kualitas sekolah. Sedangkan Standar Nasional Pendidikan nomor 3 dan 7 (Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Pembiayaan) juga perlu diperhatikan untuk meningkatkan citra di masyarakat. Karena selama ini masyarakat menganggap sekolah swasta sebagai sekolah mahal. Secara umum, masyarakat belum terlalu berpikir secara komprehensif. Terkadang masyarakat menginginkan sekolah yang bagus namun dengan biaya yang murah. Padahal biaya yang dikeluarkan juga digunakan sebagai operasional sekolah. Bapak Tridjono juga berharap cara pandang tersebut berubah, karena sekolah yang unggul memang perlu diimbangi dengan biaya yang sepadan.⁵³

Majelis Dikdasmen melakukan anjaksanaan ke SMP-SMP Muhammadiyah Surakarta. Sebagai pihak penyelenggara, Dikdasmen mengunjungi sekolah yang dipandang bermasalah untuk

diadakan pertemuan serta dilakukan pemecahan masalah secara bersama. Lembaga tersebut juga memberikan kesempatan kepada pihak sekolah untuk melakukan dialog terkait masalah yang dihadapinya. Contoh masalah yang dihadapi antara lain menurunnya semangat pendidik karena didominasi oleh guru yang lanjut usia (mendekati usia pensiun) dan sekolah yang memiliki potensi tetapi belum berkembang dan sekolah yang kekurangan murid. Selain anjaksanaan dalam rangka melakukan penyelesaian masalah sekolah, Majelis Dikdasmen juga memberikan peninggalan berupa barang yang bermanfaat untuk sekolah. Misalnya uang yang dapat diambil dengan mengajukan proposal ke Dikdasmen. Namun saat ini Majelis Dikdasmen lebih memilih untuk memberikan peninggalan berupa barang, seperti laptop maupun LCD. Hal ini dilakukan untuk memberikan motivasi kepada sekolah-sekolah Muhammadiyah di Surakarta.⁵⁴

Majelis Dikdasmen PDM Surakarta melakukan kunjungan rutin berupa supervisi ke sekolah. Pihak Dikdasmen melakukan pemantauan terhadap kondisi keuangan dan proses pembelajaran di sekolah. Hal ini dilakukan untuk mengevaluasi apakah pembelajaran yang dilaksanakan sudah baik atau belum.⁵⁵

⁵³Ibid.

⁵⁴Ibid.

⁵⁵Ibid.

Sebagai lembaga swasta, Majelis Dikdasmen belum bisa melakukan perubahan kebijakan karena zonasi merupakan kebijakan dari pemerintah. Upaya yang telah dilakukan Dikdasmen adalah koordinasi penyampaian argumentasi ke provinsi. Pihak Dikdasmen terus melakukan perbaikan dalam berbagai hal, dari sisi regulasi dilakukan penyampaian argumentasi, dari sisi lembaga diperbaiki, serta dari sisi guru diperbaiki pula. Akan tetapi, hasil belum seperti yang diharapkan. Perbaikan mutu di SMP Muhammadiyah Surakarta pun hingga saat ini terus dilakukan. Akan tetapi hasilnya belum terlalu tampak. Hasilnya akan tampak beberapa tahun ke depan, karena membutuhkan waktu.⁵⁶

Selama ini Majelis Dikdasmen terus melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap mutu SMP Muhammadiyah di Surakarta. Dalam menghadapi kebijakan zonasi, Majelis Dikdasmen berfokus pada peningkatan mutu. Majelis Dikdasmen juga melakukan anjangan ke sekolah yang bermasalah. Kunjungan ini dilakukan dengan maksud untuk memberikan motivasi serta berdialog dengan pihak sekolah agar dapat memecahkan masalah yang dihadapi. Usaha ini sedang dijalankan sehingga hasilnya belum terlihat, karena membutuhkan

beberapa waktu untuk melihat perubahan yang ada.⁵⁷

PENUTUP

Berdasarkan seluruh uraian di muka dapat diketahui bahwa kebijakan zonasi memberikan pengaruh yang beragam. SMP Muhammadiyah yang dikategorikan sebagai sekolah berkemajuan, seperti SMP Muhammadiyah Program Khusus dan SMP Muhammadiyah 1 Surakarta pengaruh tidak signifikan. SMP Muhammadiyah 4 dan 5 Surakarta dikategorikan sebagai sekolah terjerat kebijakan zonasi berpengaruh besar.

Tanggapan pengelola juga beragam. SMP Muhammadiyah Program Khusus dan SMP Muhammadiyah 1 Surakarta berpandangan bahwa kebijakan zonasi tidak menjadi faktor utama dari naik-turunnya arus masuk peserta didik baru dan kebijakan ini dianggap sebagai tantangan untuk meningkatkan kualitas sekolah. Di sebelah lain, SMP Muhammadiyah 4 dan SMP Muhammadiyah 5 Surakarta berpandangan bahwa kebijakan zonasi sangat memberikan pengaruh terhadap arus masuk peserta didik baru. Sebagai penyelenggara sekolah, Pimpinan Majelis Dikdasmen PDM Kota Surakarta menyampaikan bahwa kebijakan zonasi dianggap kurang adil bagi sekolah Muhammadiyah yang diselenggarakannya. Aturan

⁵⁶Ibid.

⁵⁷Ibid.

yang memberikan kesempatan sekolah swasta yang hanya peserta didik baru memilih empat memperoleh peserta didik non-sekolah negeri dianggap merugikan zonasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mohamad. 2010. *Reinvensi Pendidikan Muhammadiyah*. Jakarta: Al-Wasath Publishing House.
- _____. 2012. *Menyemai Sekolah Bertaraf Internasional*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah.
- _____. dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Bintoro, Ratih Fenty A. 2018. *Persepsi Masyarakat terhadap Implementasi Kebijakan Zonasi Sekolah dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tingkat SMA Tahun Ajaran 2017/2018 di Kota Samarinda*. Jurnal Riset Pembangunan Vol. 1, No. 1. Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Timur.
- Cahyani, Ayniah. 2018. *Hubungan Antara Persepsi Peserta Didik terhadap Sistem Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru dengan Minat Belajar Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 1 Banguntapan Bantul*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
- Emzir. 2008. *Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif & Kualitatif*. Jakarta: PT Rajagrafindo
- Faizal. 2017. *Upaya Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) Daerah Kota Medan dalam Meningkatkan Kualitas Sekolah Dasar dan Menengah Muhammadiyah*. Jurnal EduTech Vol. 3, No.2. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- John W, Creswell. 1994. *Research Design Qualitative Quantitative and Mixed Method Approach Second Edition*. USA: Sage Publication.
- Khadowmi, Eka Reza. 2019. *Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi terhadap Proses Penerimaan Peserta Didik Baru Kabupaten Lampung Tengah*. Skripsi. Universitas Lampung.
- Nurlailiyah, Aris. Januari 2019. *Analisis Kebijakan Zonasi terhadap Perilaku Siswa SMP di Yogyakarta*. Jurnal Realita Vol. 17 No. 1, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Nomor 51 Tahun 2018. *Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru*.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Nomor 14 Tahun 2018. *Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru.*

Purwanti, Dian. 2019. *Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru berdasarkan Sistem Zonasi di Kota Bandung.* Jurnal Governansi Vol. 5, No.1. Universitas Padjadjaran.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Pasal 31 ayat (1). *Tentang Pendidikan dan Kebudayaan.*

Undang-Undang Replublik Indonesia. Nomor 20 Tahun 2003. *Tentang Sistem Pendidikan Nasional.*